Efektivitas Penanganan Covid-19 dan Dampaknya pada Hasil Pemilihan Umum: Studi Kasus Pengaruh Penerapan Four-Pronged Strategy Pemerintahan Presiden Moon Jae-in dan Civic Duty Masyarakat Korea Selatan terhadap Kemenangan Democratic People's Party of Korea pada Pemilihan Umum Legislatif Korea Selatan Tahun 2020

Siti Aldira

Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Depok, Jawa Barat

Abstrak

Pandemi Covid-19 mendisrupsi jalannya pemilu di berbagai negara dan berpengaruh pada penurunan partisipasi pemilih dan meningkatkan potensi transmisi virus yang mengancam kesehatan masyarakat. Salah satu negara yang menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi Covid-19 adalah Korea Selatan. Berbeda dengan mayoritas negara penyelenggara pemilu lainnya di saat pandemi, Pemilu Legislatif Korea Selatan tahun 2020 menjadi pemilu legislatif dengan perolehan *turnout voters* tertinggi mencapai 66,2 persen. Pemilu tersebut dimenangkan oleh *Democratic People's Party of Korea* selaku partai pengusung Presiden Moon Jae-in. Penelitian ini membahas pengaruh dari *four-pronged strategy* yang digunakan oleh Presiden Moon Jae-in dalam menanggulangi Covid-19 terhadap kemenangan *Democratic People's Party of Korea*. Tidak hanya menggunakan penilaian *retrospective*, penelitian ini juga akan membahas tingginya *civic duty* masyarakat Korea Selatan yang mempengaruhi tingginya perolehan *turnout voters*, terlepas dari pemilu yang diadakan di tengah situasi krisis. Penelitian ini menemukan bahwa terlepas dari buruknya penilaian kebijakan ekonomi, hubungan luar negeri, dan skandal politik pada pemerintahan Presiden Moon Jae-in, situasi krisis dinilai memiliki urgensi yang lebih tinggi dan menjadi indikator utama masyarakat dalam melakukan penilaian *retrospective*. Hal tersebut didukung dengan pandangan masyarakat yang menilai Pandemi Covid-19 sebagai krisis nasional, dan berpartisipasi dalam pemilu dianggap sebagai bentuk *nation-saving duty*. Tingginya partisipasi pemilih dan efektivitas *four-pronged strategy* mempengaruhi kemenangan *Democratic People's Party of Korea* pada Pemilu Legislatif Korea Selatan tahun 2020.

Kata kunci: pemilihan umum, Pemerintah Korea Selatan, Covid-19, *four-pronged strategy*, *civic duty*

*) Corresponding Author: rara.aldiraa27@gmail.com, +6285659159796

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 berdampak pada aspek politik, termasuk mendisrupsi jalannya pemilu di beberapa negara. Pemerintah bersama dengan badan penyelenggara pemilu menemui berbagai persoalan, terutama untuk beradaptasi agar tetap bisa menyelenggarakan pemilu di tengah kondisi pandemi. Terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko penyebaran virus, yaitu lewat perencanaan yang baik untuk mencegah krisis dan mengurangi potensi kontak *person-to-person* selama proses pemilu berlangsung. Masalah lain yang kerap dihadapi adalah rendahnya jumlah pemilih, minimnya jaminan proteksi kesehatan masyarakat, dan respons pemerintah dalam menangani pandemi yang akan berpengaruh pada hasil pemilihan umum (Maizland, 2020).

Tercatat terdapat 60 negara yang memutuskan untuk menunda waktu pemilu, namun tidak sedikit yang memilih untuk tetap melangsungkan pemilihan umum. Setidaknya, terdapat 28 negara termasuk Mali, Prancis, Amerika Serikat hingga Korea Selatan memilih untuk tetap menyelenggarakan pemilu di tengah kondisi pandemi dalam rentang waktu bulan Maret-Mei 2020 (Landman, Todd & Di Gennaro, 2020). Namun, masalah baru justru ditemui pada masa persiapan hingga pasca penyelenggaraan pemilu tersebut.

Penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi tidak hanya memerlukan berbagai adaptasi, tetapi juga kesiapan EMB (Electoral Management Body) sebagai badan penyelenggara pemilu. EMB harus memiliki *risk management* yang mumpuni, agar mampu untuk memahami situasi dan

LITERATUS adalah jurnal yang diterbitkan oleh Neolectura, diterbitkan dua kali dalam satu tahun. LITERATUS adalah media publikasi ilmiah dalam bentuk makalah konseptual dan penelitian lapangan yang terkait dengan bidang kajian sosial dan budaya. Diharapkan LITERATUS dapat menjadi media bagi akademisi dan peneliti untuk menerbitkan karya ilmiah mereka dan menjadi sumber referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Fokus:
Sosial dan Budaya

Ruang lingkup:
Humaniora, Pendidikan, Manajemen, Sejarah, Ekonomi, Linguistik, Sastra, Agama, Politik, Sosiologi, Antropologi, dan lainnya.

langkah yang tepat dalam menanggapi disrupsi tersebut. Secara spesifik, EMB memerlukan *electoral risk management*, sebagai upaya sistematis yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai potensi disrupsi dalam pemilu, dan kesadaran situasional mengenai risiko yang dapat menghambat proses pemilu. Dalam negara demokratis, *risk management* digunakan untuk mengukur sejauh mana mitigasi dapat dilakukan oleh pemerintah (IDEA Team, 2016, p. 10). Negara-negara dengan EMB yang mampu mengakomodir kebutuhan pemilih dengan fasilitas yang aman, akan memperoleh hasil *turnout voters* yang tinggi terlepas dari pemilu dilaksanakan di tengah situasi krisis (International IDEA, 2020).

Meski terjadi peningkatan jumlah kasus positif yang signifikan, salah satu negara yang menyelenggarakan pemilu yang memiliki *turnout voters* tinggi, meski dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 adalah Amerika Serikat. Setelah sebelumnya mengalami kenaikan angka kasus positif pada primary election di negara bagian Wisconsin, Amerika Serikat menyediakan berbagai opsi bagi pemilih dalam menggunakan suara pada Pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 2020. Metode tersebut meliputi *absentee voting* dalam bentuk *mail-voting* dan pemilihan secara langsung di TPS. Metode *mail-voting* menyumbang 65,487,353 suara (41,5 persen) dan menjadi perolehan tertinggi dalam 3 (tiga) pemilu terakhir (Sullivan, 2020, p. 13).¹

Sumber: US Elections Project, '2020 General Election Early Vote Statistics' (2021)

Gambar 1. Perolehan Suara Pemilu Presiden Amerika Serikat 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Hal menarik terjadi pada Pemilu Legislatif Korea Selatan tahun 2020. Korea Selatan menjadi salah satu negara yang berhasil menyelenggarakan pemilihan umum di tengah kondisi pandemi, bahkan tidak membentuk kluster baru dan mampu mengurangi angka positif kasus Covid-19 pasca pemilu. Pada 15 April 2020, Korea Selatan melangsungkan pemilihan umum untuk memilih calon legislatif yang akan menempati kursi di parlemen Korea Selatan. Meski berada di tengah situasi pandemi, hasil capaian jumlah pemilih pada pemilu kali ini mencapai angka 66,21 persen dan menjadi capaian tertinggi dalam pemilu legislatif selama 28 tahun terakhir (Landman & Di Gennaro, 2020).

National Election Commission (NEC) selaku EMB di Korea Selatan, turut mengupayakan metode-metode lain dalam pemilu, seperti *mail-voting*. Namun, hal tersebut hanya diperuntukkan bagi kelompok yang rentan terpapar Covid-19. Tingginya angka partisipasi pemilih diraih lewat pemungutan suara secara langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemerintah Korea Selatan bersama dengan National Election Commission (NEC) dan Korean Disease Control and Prevention Agency (KDCA) bekerja sama untuk menyiapkan berbagai mekanisme penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi, hingga mampu menerbitkan *Code of Conduct for Voters* sebagai jaminan proteksi kesehatan bagi warga negara Korea Selatan (Spinelli, 2020, p. 3).

¹ Terjadi peningkatan 20 juta suara dengan metode *mail-voting* jika dibandingkan dengan Pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 2016. Metode ini berlaku bagi semua orang di negara bagian yang menerapkan metode *mail voting* tanpa terkecuali. Kondisi pandemi COVID-19 meningkatkan persentase pilihan pemilih dengan metode *mail voting* hingga 55 persen (Persilly, Nathaniel & Charles Stewart III, 2021).

Pada awal masa pandemi Covid-19, Korea Selatan menjadi negara di luar Tiongkok dengan kasus positif Covid-19 terbanyak, hingga mencapai 909 kasus pada Februari 2020 (The Government of the Republic of Korea, 2020). Namun, dalam kurun waktu 20 hari, kasus positif Covid-19 di Korea Selatan turun secara signifikan hingga mampu meratakan kurva tanpa membatasi kebebasan dan pergerakan masyarakat dalam bentuk karantina wilayah (The Government of the Republic of Korea, 2020). Selain terlatih dalam menangani masalah pandemi, Korea Selatan memiliki kerangka hukum dan sistem politik yang cukup jelas, sehingga berbagai perubahan termasuk pelaksanaan pemilu di tengah pandemi dapat lebih mudah dilakukan. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, pemerintah bersama dengan NEC dan KDCA melakukan berbagai upaya, seperti (1) menerapkan *four-pronged strategy*; (2) mengadakan *early voting*; (3) mengadakan kembali *home voting*; (4) memastikan protokol kesehatan maksimum selama pemilu; (5) membangun komunikasi yang baik dengan publik; (6) meminimalkan penggunaan metode *Out-Of-Country Voting* (OCV); dan (7) memaksimalkan *strong civic duty* yang telah dimiliki oleh masyarakat Korea Selatan (Spinelli, 2020, p. 2-7).

Kerja sama yang dibangun oleh Pemerintah Korea Selatan untuk melaksanakan pemilu di tengah kondisi pandemi, dilakukan lewat upaya memaksimalkan proteksi kesehatan masyarakat selama pandemi Covid-19. Namun, faktor menarik justru terlihat dari tingginya *civic duty* pada masyarakat yang dapat mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemilu. *Civic duty* kerap dikaitkan dengan intensi individu untuk menggunakan hak suara dalam pemilu (Almond, 1963; Dalton, 2008). Hal tersebut juga memicu terbentuknya pola pikir bahwa tidak menggunakan suara dalam pemilu merupakan suatu tindakan yang keliru, karena pemilu dianggap sebagai sebuah kewajiban dan penghayatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Kehadiran pemilu legislatif dalam skala besar tersebut, membuat para pemilih di Korea Selatan menunjukkan tekad yang kuat untuk menjalankan tugas sipil sebagai warga negara untuk memilih, meski harus mempertaruhkan kesehatan untuk tetap memberikan suara di tengah kondisi pandemi (Spinelli, 2020, p. 5).

Keberhasilan penanganan Covid-19 di Korea Selatan turut berdampak pada hasil pemilu legislatif tahun 2020. Pada pemilu kali ini, Democratic People's Party of Korea sebagai partai pengusung Presiden Moon Jae-in berhasil memenangkan 180 dari 300 kursi dalam parlemen Korea Selatan (Tong-hyung, 2020, p. 2). *Approval rating* dari Presiden Moon Jae-in turut mengalami kenaikan hingga 70 persen, setelah sebelumnya berada di angka 30-40 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh keberhasilan penerapan *four-pronged strategy* yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam menangani pandemi Covid-19 (Joseph, Yi & Lee Wondong, 2020).

Selain faktor keberhasilan tersebut, kuatnya *civic duty* masyarakat Korea Selatan turut memainkan peran penting dalam peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif Korea Selatan tahun 2020. Paradoks tercipta ketika masyarakat yang seharusnya menjauhi kotak suara di tengah pandemi, namun hal tersebut justru mendorong masyarakat Korea Selatan untuk menggunakan hak suara sebagai bentuk simbolis perlawanan pada pandemi Covid-19. Didukung dengan jaminan kesehatan yang baik, masyarakat Korea Selatan tidak dihadapkan pada pilihan antara menggunakan hak suara atau melindungi kesehatan tiap individu. Krisis ini justru mendorong rasa persatuan nasional masyarakat, terlepas dari afiliasi politik dari masing-masing pemilih.

Fenomena ini disebut masyarakat Korea Selatan sebagai bentuk *nation-saving duty* yang terbentuk karena tingginya *civic duty* dan budaya Konfusianisme yang mengakar pada masyarakat. Sebelumnya, konsep *nation-saving duty* pernah tercetus saat pemakzulan Presiden Park Geun-Hye di tahun 2017 (Se-Hwan, 2020). Saat itu, masyarakat Korea Selatan memilih untuk menggunakan hak suara pada pemilu, agar tidak lagi berada di bawah kepemimpinan Presiden Park Geun-Hye maupun calon kandidat dari partai yang berafiliasi dengannya, hingga mampu memenangkan Moon Jae-In sebagai Presiden Korea Selatan periode 2017-2022. Capaian hasil jumlah pemilih pada Pemilu Presiden Korea Selatan tahun 2017 mencapai 77,23 persen (Election Guide, 2020).

Penelitian ini membahas tentang efektivitas penerapan *four-pronged strategy* yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Moon Jae-in dan tingginya *civic duty* pada masyarakat Korea Selatan dapat mempengaruhi tingginya jumlah pemilih pada Pemilu Legislatif Korea Selatan tahun 2020 yang dimenangkan oleh Democratic People's Party of Korea. Selain karena

LITERATUS adalah jurnal yang diterbitkan oleh Neolectura, diterbitkan dua kali dalam satu tahun.

LITERATUS adalah media publikasi ilmiah dalam bentuk makalah konseptual dan penelitian lapangan yang terkait dengan bidang kajian sosial dan budaya.

Diharapkan **LITERATUS** dapat menjadi media bagi akademisi dan peneliti untuk menerbitkan karya ilmiah mereka dan menjadi sumber referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Fokus:
Sosial dan Budaya

Ruang lingkup:
Humaniora, Pendidikan, Manajemen, Sejarah, Ekonomi, Linguistik, Sastra, Agama, Politik, Sosiologi, Antropologi, dan lainnya.

faktor keberhasilan penanganan Covid-19, tingginya *civic duty* dan pengaruh budaya Konfusianisme turut berperan dalam membentuk *neo-confucianism politics* di Korea Selatan yang secara langsung berpengaruh pada pola interaksi antara masyarakat dan pemerintah, serta kelompok masyarakat sipil yang terbentuk di Korea Selatan. Faktor-faktor seperti *civic duty* yang tinggi, paham Konfusianisme, serta keberhasilan menangani pandemi di Korea Selatan berdampak pada kemenangan partai petahana dalam pemilu legislatif dengan jumlah pemilih tertinggi dalam 28 tahun terakhir.

Bagian selanjutnya dalam tulisan ini akan membahas mengenai teori yang digunakan, yaitu teori *civic duty*, konsep Konfusianisme, dan teori *retrospective voting*. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori secara eklektik (*theoretical eclecticism*), mengingat riset ini berorientasi pada masalah yang tidak dapat dikaji dengan hanya satu teori. Selanjutnya, hasil penelitian ini akan membahas terkait tingginya *civic duty* pada masyarakat, hubungan konfrontatif yang terbentuk antara masyarakat dan pemerintah yang dipengaruhi oleh *neo-confucianism politics*, dan kebijakan *four-pronged strategy* yang menjadi basis penilaian utama masyarakat dalam *retrospective voting*. Pada bagian pembahasan akan dibahas seberapa besar signifikansi dari *four-pronged strategy* dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Korea Selatan yang dan tingginya *civic duty* pada masyarakat, hingga menganggap penggunaan suara dalam pemilu kali ini sebagai bentuk *nation-saving duty*. Berbagai faktor tersebut secara signifikan mempengaruhi popularitas Presiden Moon Jae-in dan kemenangan *Democratic People's Party of Korea* pada Pemilu Legislatif Korea Selatan tahun 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19.

Civic Duty

Konsep *civic duty* digunakan untuk mengevaluasi standar '*good citizenship*' yang berpengaruh pada intensi seseorang untuk memilih pada pemilu (Almond, Gabriel & Sidney Verba 1963; Dalton, 2008). Meski memiliki cakupan yang luas, ruang lingkup pembahasan *civic duty* dikorelasikan dalam bentuk penggunaan hak suara dalam pemilihan umum. Terdapat beberapa akademisi yang menyatakan teori terkait dengan *civic duty*, namun untuk menjelaskan peranan *civic duty* dalam Pemilu Legislatif Korea Selatan tahun 2020, penelitian ini menggunakan teori *civic duty* yang dikemukakan oleh Blais dan Achen (2018).

Sebelumnya, Blais menyatakan *civic duty* sebagai suatu pemahaman untuk menggunakan hak suara dalam pemilu, karena jika tidak, hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang keliru (*wrongful behaviour*). Terdapat dua elemen yang mempengaruhi pemikiran tersebut, yaitu (1) voting dianggap sebagai kewajiban pada saat pemilu; (2) Keyakinan akan pentingnya demokrasi dan penghargaan terhadap nilai-nilai yang terkait dengan hak untuk memilih. Kewajiban bagi warga negara untuk memberikan suara pada pemilu, tidak dianggap sebagai bentuk kewajiban hukum, karena warga negara menyadari hal tersebut menjadi sebuah bentuk kewajiban moral. Hal ini menegaskan bahwa *civic duty* menjadi faktor pendorong dalam keputusan untuk memilih dan berpengaruh pada hasil *turnout voters* dalam pemilu. Teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh André Blais bersama dengan Christopher A. Achen di tahun 2018.

Pada dasarnya, terdapat tiga faktor utama yang memotivasi seseorang untuk menggunakan hak suara, ketiga faktor tersebut adalah (1) terdapat intensi untuk mempengaruhi *outcome* dari pemilihan umum, (2) sarana untuk mengekspresikan pandangan politik, dan (3) merasa memiliki rasa tanggung jawab untuk memberikan suara (*ethically right*). Birch (2009) turut menyatakan bahwa alasan terbesar seseorang akan memilih pada pemilu, dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang menyatakan voting sebagai gerakan patriotik yang merefleksikan keinginan warga negara untuk berpartisipasi dalam negara demokratis dan turut andil menjadi bagian dari *good society*.

Civic duty turut mempengaruhi preferensi pilihan pemilih dalam pemilu. Tingginya *civic duty* seorang individu mampu meningkatkan kemampuan kognitif, akuntabilitas individu untuk membuat keputusan yang tepat, dan mengaktifkan kemampuan seseorang untuk memperoleh informasi secara lebih terbuka (*open-minded information research*) (Kam, 2007). Mullinix (2018) juga menjelaskan bahwa rasa *civic duty* yang kuat dari seorang individu, membuatnya lebih objektif dalam menerima informasi dan menilai suatu kebijakan, dengan mengesampingkan preferensi politik maupun status partisan dalam penilaian tersebut. *Civic duty* yang tinggi dapat menurunkan tendensi partisan untuk mengikuti keputusan partai, sekaligus mencari informasi terkait suatu kebijakan dengan perspektif yang lebih beragam (Pietryka, 2016).

Civic duty dalam penelitian ini mampu untuk meringkas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemenangan Democratic People's Party of Korea dalam Pemilu Legislatif Korea Selatan tahun 2020. Namun, terdapat sebuah pola menarik terkait dengan '*nation-saving duty*' yang kerap dijadikan oleh masyarakat Korea Selatan sebagai pemicu untuk berpartisipasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan di negara tersebut. Konsep '*nation-saving duty*' turut berkembang di tahun 2017 saat proses pemakzulan pada Presiden Park Geun-hye, akibat berbagai kasus korupsi dan skandal politik yang terjadi di bawah pemerintahannya. Hal tersebut memicu meningkatnya partisipasi masyarakat Korea Selatan untuk memberikan suara pada pemilu, hingga mampu mencapai angka 77,2 persen dalam perolehan hasil *turnout voters* (Election Guide, 2020). Hasil ini menjadi perolehan *turnout voters* tertinggi dalam pemilu presiden selama kurun waktu tiga dekade terakhir. Pola yang sama turut terlihat dalam Pemilu Legislatif Korea Selatan tahun 2020 yang dijalankan di tengah kondisi pandemi. *Turnout voters* yang dicapai pada pemilu kali ini sebesar 66,2 persen dan menjadi perolehan tertinggi dalam pemilu legislatif sejak restorasi sipil tahun 1976. Dua fenomena ini menjadi hal yang penting, karena masyarakat Korea Selatan menyadari hak-hak politiknya dapat berpengaruh besar dalam kehidupan bernegara.

Konfusianisme

Pola bentuk keterlibatan masyarakat Korea Selatan dipengaruhi oleh Konfusianisme yang mengakar pada negara-negara Asia Timur. Konfusianisme dipahami sebagai konstelasi wacana moral, praktik sosial, dan aspirasi etis dalam masyarakat Asia Timur, yang berdampak pada aspek sosial, pendidikan, agama, rekreasi, ekonomi yang mencakup ranah publik dan ranah privat (Will Kymlicka, 1995, p. 76). Konfusianisme merupakan seperangkat keyakinan dan nilai yang terorganisir dan tertanam dalam aspek-aspek penting, seperti keluarga, moralitas, etika sosial, dan ranah publik. Ide-ide dalam tradisi Konfusianisme tidak secara langsung berdampak, namun secara signifikan dapat menyesuaikan dengan konteks lingkungan yang tengah berkembang (Chang & Kalmanson, 2010).

Konfusianisme turut mempengaruhi terbentuknya *neo-confucianism politics* yang mempengaruhi hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat. *Neo-confucianism politics*, bercirikan (1) tujuan negara adalah kesejahteraan masyarakat; (2) Apabila negara gagal untuk memenuhi hal tersebut, baik secara ekonomi dan moral, maka harus ada yang berjuang untuk memperbaiki kembali kondisi negara; (3) *Civil society* terbentuk dari intelektual yang memastikan negara tetap berada di jalur yang tepat (*benevolent government*); dan (4) agen pergerakan adalah masyarakat yang berkeinginan untuk memperjuangkan sesuatu atas nama *public goods* dan mengindahkan kepentingan pribadi, serta berasal dari luar pemerintah. Bentuk interaksi seperti itu akan memudahkan evaluasi terkait dengan *civic activism* dan praktik sosial yang terjadi di Korea Selatan.

Retrospective Voting

Basis dasar dari teori *retrospective voting* adalah kecenderungan pemilih untuk menentukan pilihan dalam pemilu, yang ditentukan oleh persepsi pribadi dalam melihat calon kandidat petahana, berdasarkan hasil kinerja yang dilakukan dalam satu periode pemerintahan. Fiorina (1981) berupaya untuk menjelaskan teori *retrospective voting* dengan mengasosiasikannya ke dalam dua studi sebelumnya. Studi pertama dilakukan oleh Key (1925) yang memposisikan pemilih sebagai pihak dengan pola pikir *result oriented*, sehingga cakupan penilaian yang dilakukan mengarah pada bentuk *reward* (imbalan) dan *punishment* (hukuman). *Reward* dan *punishment* diwujudkan lewat pilihan dalam pemilu, terutama pada pemerintah petahana atau partai mayoritas dalam parlemen. Sementara, studi yang dilakukan oleh Downs (1957), memposisikan pemilih sebagai subjek yang akan berpihak pada kebijakan yang memberikan kenyamanan, sekaligus memberikan dampak dan prospek yang jelas di masa mendatang.

Dua pendekatan yang diambil oleh Fiorina (1981) mengarah pada pembentukan *retrospective evaluation*, sebagai bentuk konkret pilihan pemilih dalam pemilu. *Retrospective evaluation* mengartikulasikan hasil pemilu berdasarkan *prospective evaluation* yang dilakukan oleh pemilih pada kandidat petahana atau partai yang berafiliasi dengan kandidat tersebut.

LITERATUS adalah jurnal yang diterbitkan oleh Neolectura, diterbitkan dua kali dalam satu tahun.

LITERATUS adalah media publikasi ilmiah dalam bentuk makalah konseptual dan penelitian lapangan yang terkait dengan bidang kajian sosial dan budaya.

Diharapkan **LITERATUS** dapat menjadi media bagi akademisi dan peneliti untuk menerbitkan karya ilmiah mereka dan menjadi sumber referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Fokus:
Sosial dan Budaya

Ruang lingkup:
Humaniora, Pendidikan, Manajemen, Sejarah, Ekonomi, Linguistik, Sastra, Agama, Politik, Sosiologi, Antropologi, dan lainnya.

Retrospective voting hanya berlaku pada calon kandidat petahana, karena penilaian mengenai dampak dari suatu kebijakan akan lebih mudah dilakukan apabila sebelumnya sudah memiliki rekam jejak mengenai hasil kinerja. Hal ini juga berdampak pada kemungkinan adanya peningkatan ekspektasi pada calon kandidat yang berasal dari partai yang sama dengan pemimpin pada periode sebelumnya. Proses evaluasi yang terjadi dalam *retrospective evaluation* akan memberikan informasi pada pemilih, terutama informasi mengenai rekam jejak calon kandidat petahana. Namun, proses evaluasi ini kerap membuat pemilih hanya terfokus pada rekam jejak pemerintah, dan hanya memberikan sedikit atensi bagi gambaran kebijakan hingga kinerja yang akan dilakukan oleh kandidat petahana pada periode mendatang. Evaluasi dilakukan pada aspek-aspek kebijakan, terutama kebijakan ekonomi.

Retrospective voting dapat terbangun, karena pemerintah petahanan dianggap bertanggung jawab atas kondisi ekonomi di suatu negara. Jika pola pikir ini tidak terbangun, tiap individu tidak dapat menilai kinerja, memprediksi kompetensi dari suatu partai, atau menerka arah kebijakan yang sekiranya akan diambil partai tersebut (Peffley, 1984). Selain partai mayoritas dalam parlemen, pihak yang kerap menerima penilaian adalah presiden, karena presiden dianggap memegang tanggung jawab dalam setiap produk kebijakan yang berdampak bagi masyarakat.

Retrospective voting dapat menjadi basis teori untuk menjelaskan kemenangan Democratic People's Party of Korea selaku partai petahana pada Pemilu Legislatif Korea Selatan tahun 2020. Teori ini berfokus pada penilaian masyarakat yang didasarkan pada kinerja petahanan, terutama yang berpusat pada presiden. Dalam hal ini, masyarakat Korea Selatan berfokus pada respons dan efektivitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Moon Jae-in dan Democratic People's Party of Korea, dalam menangani pandemi Covid-19 di negara tersebut. Teori ini juga mampu untuk menjelaskan latar belakang di balik tendensi pilihan politik masyarakat Korea Selatan yang mampu memenangkan Democratic People's Party of Korea, sebagai partai pengusung Presiden Moon Jae-in pada pemilu kali ini. Penilaian dilakukan atas dasar kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah Presiden Moon Jae-in dalam menangani gelombang pertama dan kedua Covid-19 di Korea Selatan. Meski penilaian menitik beratkan pada performa presiden, *retrospective evaluation* juga dapat mengartikulasikan prediksi hasil pemilu berdasarkan evaluasi pemilih pada partai yang berafiliasi dengan presiden tersebut, sehingga dapat menjadi basis teoritis untuk menjelaskan kemenangan partai petahana dalam Pemilu Legislatif Korea Selatan tahun 2020.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digambarkan sebagai proses penemuan model yang terjadi dalam suatu lanskap penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengembangkan teori berdasarkan fenomena sosial yang tengah diteliti (Creswell, 1994; p. 83-84). Pemilihan metode kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menafsirkan suatu fenomena berdasarkan teori yang selanjutnya dapat dikembangkan sesuai dengan fenomena yang terjadi pada lanskap penelitian. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh penerapan *four-pronged strategy* yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Moon Jae-in dalam menangani pandemi Covid-19 di Korea Selatan dan tingginya *civic duty* pada masyarakat Korea Selatan terhadap dalam hasil Pemilihan Umum Legislatif Korea Selatan tahun 2020.

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik studi literatur. Studi literatur dilakukan lewat pencarian sumber-sumber bahan bacaan, berupa buku, jurnal, laman web, hingga basis data daring yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan untuk memperkuat dasar teori, mengumpulkan data, hingga menganalisis data. Politik elektoral Korea Selatan menjadi lanskap utama dalam penelitian ini, sehingga metode studi literatur digunakan untuk menganalisis data sekunder yang didapatkan lewat sumber-sumber bahan bacaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kemampuan pemerintahan Presiden Moon Jae-in bersama dengan KDCA memiliki manajemen penanggulangan krisis yang baik dalam bentuk *four-pronged strategy* dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Meski sempat melakukan blunder di awal masa penanganannya, strategi ini mampu meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintahan Presiden Moon Jae-in, lewat penurunan angka *swing voters* dari 31,5 persen hingga 18 persen dan kenaikan angka *approval rating* mencapai 73 persen menjelang waktu pemilihan (10-13 April 2020). Democratic People's Party of Korea mengalami kenaikan popularitas sejalan dengan kenaikan popularitas Presiden Moon Jae-in. Hal tersebut turut dipengaruhi oleh tidak adanya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh partai oposisi dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Partai oposisi hanya berfokus pada stagnasi ekonomi yang terjadi akibat kebijakan ekonomi Presiden Moon Jae-in yang dianggap tidak lebih penting dari proteksi kesehatan masyarakat dan stagnasi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Masyarakat memiliki hubungan yang konfrontatif dengan pemerintah maupun partai oposisi, karena dipengaruhi oleh *neo-confucianism politics* yang membentuk hubungan konfrontatif antara masyarakat dan pemerintah. Pemakzulan Presiden Park Geun-hye dan kritik atas kebijakan pemerintah Presiden Moon Jae-in di awal pandemi Covid-19, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengaruh besar dalam menentukan keputusan kolektif dalam politik di Korea Selatan. Presiden Moon Jae-in mengalami penurunan *approval rating* yang drastis akibat *blunder* di awal masa penanggulangan pandemi, hingga berpengaruh pada petisi pemakzulannya sebagai presiden. Partai oposisi yang tidak menawarkan kebijakan lain yang lebih baik turut mendapat kritik dengan kekalahan yang dialami pada Pemilu Legislatif Korea Selatan tahun 2020.

Pandemi Covid-19 dinilai sebagai krisis nasional, sehingga membuat penggunaan suara dalam pemilu sebagai bentuk *nation-saving duty* yang perlu dilakukan secara kolektif. Secara umum, pemilu kali ini bukan sebagai kewajiban hukum karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Seperti yang dikemukakan oleh Blais dan Achen, *civic duty* menjadi pendorong utama masyarakat untuk memilih karena menilai hal tersebut sebagai hal yang tepat untuk dilakukan (*ethically right*). Dalam suatu survei dinyatakan bahwa 81,6 persen masyarakat Korea Selatan mengaku memperhatikan seluruh rangkaian pemilu dan 79 persen memastikan dirinya akan memilih dalam Pemilu Legislatif Korea Selatan tahun 2020 (Bok-byo, Jeong & Kim Jung-ju, 2021). Partisipasi pemilih dalam pemilu kali ini bertujuan untuk mempengaruhi *outcome*, sebagai bentuk ekspresi politik, dan tanggung jawab kolektif yang dipengaruhi oleh jaminan kesehatan yang diberikan lewat *four-pronged strategy* dan strategi adaptasi NEC dalam menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi Covid-19. Meskipun tidak bisa dipungkiri, *regional voting* masih terlihat di beberapa wilayah, seperti Gyeongsangbuk-do dan Jeollanam-do. Namun, hal tersebut tidak menjadi faktor determinan. *Regional voting* menjadi alasan bagi para pemilih untuk memilih di luar faktor *civic duty*.

Kemenangan *Democratic People's Party of Korea* dipengaruhi oleh penilaian *retrospective* yang digunakan untuk menilai kinerja *Democratic People's Party of Korea*. Pada kondisi Korea Selatan, kondisi ekonomi dan kebijakan luar negeri menjadi indikator utama penilaian. Namun, *retrospective evaluation* secara kualitatif dapat menjadikan faktor lain dengan urgensi yang lebih tinggi sebagai basis utama penilaian. Depresi ekonomi dan kesehatan masyarakat dinilai lebih penting, daripada tiga isu utama yang digadang akan menurunkan popularitas *Democratic People's Party of Korea*, yaitu (1) stagnasi pertumbuhan ekonomi; (2) Stagnasi reunifikasi dengan Korea Utara, dan (3) skandal politik yang melibatkan mantan Menteri Kehakiman, Cho Kuk.

Dawns turut menyatakan bahwa pemilih akan cenderung memilih pemimpin yang menawarkan prospek yang lebih baik. Hal tersebut terlihat dari popularitas *Democratic People's Party of Korea* jika dibandingkan dengan partai oposisi. Pemilih juga akan memberikan suara sebagai *reward* atas penilaian kinerja petahana, yaitu Presiden Moon Jae-in dan *Democratic people's Party of Korea*. Berdasarkan *retrospective evaluation* yang dilakukan, kinerja pemerintah dalam menanggulangi pandemi menjadi basis utama penilaian masyarakat. Penggunaan *four-pronged strategy* yang efektif, membuat masyarakat memberikan *reward* lewat surat suara yang diberikan dan mampu memenangkan *Democratic People's Party of Korea*.

Pembahasan

LITERATUS adalah jurnal yang diterbitkan oleh Neolectura, diterbitkan dua kali dalam satu tahun. LITERATUS adalah media publikasi ilmiah dalam bentuk makalah konseptual dan penelitian lapangan yang terkait dengan bidang kajian sosial dan budaya. Diharapkan LITERATUS dapat menjadi media bagi akademisi dan peneliti untuk menerbitkan karya ilmiah mereka dan menjadi sumber referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Fokus:
Sosial dan Budaya

Ruang lingkup:
Humaniora, Pendidikan, Manajemen, Sejarah, Ekonomi, Linguistik, Sastra, Agama, Politik, Sosiologi, Antropologi, dan lainnya.

Nation saving-duty bukan hal yang asing dalam masyarakat Korea Selatan. Pada Pemilu Presiden Korea Selatan tahun 2017, *nation saving-duty* pertama kali muncul dan berdampak pada tingginya angka *turnout voters* hingga 77,2 persen (Election Guide, 2020). Hal tersebut dipicu oleh *Candlelight Vigil Revolution*² 2016-2017 yang berhasil menekan keputusan pemakzulan Presiden Park Geun-hye dan digantikan oleh Presiden Moon Jae-in lewat mekanisme pemilu. Berbeda dengan pemilu yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, pada Pemilu Presiden Korea Selatan tahun 2017, suara dalam pemilu didominasi oleh generasi milenial (kelompok dengan rentang waktu kelahiran 1980-1996) dan generasi Z (kelompok dengan rentang waktu kelahiran 1997-2010). Akibatnya, terjadi lonjakan partisipasi politik masyarakat, karena masyarakat Korea Selatan menyadari bahwa iklim partisipatif menjadi hal yang tepat dibutuhkan dan menjadi ekspresi '*New Politics*' di Korea Selatan (Delury, n.d., p. 54).

Presiden Moon Jae-in melakukan pendekatan baru dengan mengedepankan pemerintahan yang terbuka, transparan, menjunjung reformasi, keadilan, yang diwujudkan dalam bentuk kanal Blue House Petition.³ Presiden Moon Jae-in juga turut memiliki rangkaian kebijakan yang progresif, seperti (1) kenaikan upah minimum hingga 10,9 persen (2019); (2) Limitasi jam kerja bagi seluruh perusahaan sebesar 52 jam/minggu, dan membuka peluang reunifikasi dengan pertemuan intensif dengan Korea Utara (Joseph, Yi & Lee Won-dong, 2020). Ketiga kebijakan ini mampu menaikkan *approval rating* Presiden Moon Jae-in hingga 84 persen.

Tingginya angka *approval rating* tersebut tidak berlangsung lama, sebab pada tahun 2019 performa pemerintahan Presiden Moon Jae-in mengalami penurunan akibat (1) stagnasi pertumbuhan ekonomi; (2) Minimnya perkembangan reunifikasi dengan Korea Utara, dan (3) skandal politik yang melibatkan mantan Menteri Kehakiman di era pemerintahannya, Cho Kuk. Tiga isu ini berdampak pada penurunan angka *approval rating* dari Presiden Moon Jae-in hingga 42,5 persen (Joseph, Yi & Lee Won-dong, 2020). Tidak hanya itu, ketiga isu ini juga digadang akan menjadi isu utama pada Pemilu Legislatif Korea Selatan tahun 2020 yang turut mempengaruhi kemenangan Democratic People's Party of Korea selaku partai pengusung Presiden Moon Jae-in.

Kondisi berbeda dihadapi setelah Korea Selatan turut menghadapi pandemi Covid-19. Pemerintahan Presiden Moon Jae-in, sempat melakukan blunder pada gelombang pertama penyebaran Covid-19, dengan tidak menutup akses masuk bagi warga negara asing, terutama yang berasal dari Tiongkok. Pemerintahan Presiden Moon Jae-in juga turut memberikan bantuan 3 (tiga) juta masker kepada Tiongkok di saat Korea Selatan tengah mengalami lonjakan harga masker akibat pandemi. Hal ini berimbas pada munculnya petisi untuk memakzulkan Presiden Moon Jae-in dengan dukungan mencapai 730,000 suara dan penurunan popularitas Democratic People's Party of Korea (Choon, 2020).

Presiden Moon Jae-in berupaya memperbaiki hal tersebut dengan bekerja sama dengan KDCA (Korea's Infectious Disease Control and Prevention Agency) untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Secara langsung Presiden Moon Jae-in menunjuk Jeong Eun-kyeong sebagai Direktur Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) untuk menangani pandemi Covid-19 di Korea Selatan. Sebelumnya, Jeong Eun-kyeong telah berpengalaman dalam

² *Candlelight Vigil Revolution* tahun 2002 didasari oleh terbunuhnya dua orang remaja berusia 14 tahun oleh kendaraan militer Amerika Serikat di Yangju, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Hak hukum '*Status of Forces Agreement*' membuat pemerintah Korea Selatan tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus tersebut. Putusan pengadilan Amerika Serikat memutuskan dua tentara tersebut tidak bersalah atas kelalaian yang berujung pada pembunuhan, dan menimbulkan kemarahan publik Korea Selatan (Myeong-son, 2012); *Candlelight Vigil Revolution* tahun 2004 terjadi karena skandal korupsi yang menimpa saudara Presiden Roh Mo-hyun dan dukungan terbuka dari Presiden Roh Mo-hyun untuk partai Uri. Presiden Roh Mo-hyun menolak meminta maaf di ruang publik dan dianggap tidak mampu mempertahankan netralitas politiknya, yang berdampak pada pemakzulannya di tahun 2004 (Len, 2004); Dan, *Candlelight Vigil Revolution* tahun 2008 terjadi sebagai bentuk protes masyarakat atas implementasi kebijakan impor sapi dari Amerika Serikat di tengah wabah sapi gila yang merebak sejak tahun 2003. Masyarakat menilai pemerintah menurunkan standar keamanan obat dan pangan di Korea Selatan (Do-hyun, 2010).

³ Media komunikasi yang dibangun oleh Presiden Moon Jae-in yang bertujuan untuk mengatasi masalah warga negara di Korea Selatan (대한민국 청와대, 2020). Filosofi dari program ini adalah '*the government will answer, if the public asks*', yang membuka peluang bagi masyarakat untuk mengajukan petisi nasional yang akan ditanggapi oleh pejabat Blue House apabila petisi tersebut direkomendasikan lebih dari 200,000 orang selama rentang waktu 30 hari.

menangani wabah yang terjadi di Korea Selatan, seperti penanganan wabah H1N1 pada 2009 dan wabah MERS di tahun 2015 (Sohee & Heesu, 2020). Jeong Eun-kyeong bersama dengan Kwon Jun-woo (Wakil Direktur Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) berperan sebagai juru bicara sekaligus mengepalai seluruh upaya penanganan Covid-19 di Korea Selatan. Terpilihnya Jeong Eun-kyeong sebagai direktur utama mendapat respons positif dari masyarakat.

Sebelumnya, Korea Selatan memiliki pengalaman buruk dalam menanggulangi MERS di tahun 2015 dan berimbas pada kolapsnya layanan kesehatan di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan melakukan amandemen South Korea's Infectious Disease Control and Prevention Act⁴, yang memberikan hak bagi pemerintah untuk memberlakukan rangkaian kebijakan di tengah krisis, termasuk menggunakan data pribadi masyarakat. Dalam menanggulangi pandemi Covid-19, KDCA bersama dengan pemerintah memperkenalkan *four-pronged strategy* (*testing, tracking, tracing, dan treating*) untuk menanggulangi pandemi, dengan mengedepankan penggunaan ICT, proses penapisan skala besar, adaptasi kehidupan baru, dan proses pemulihan ekonomi.

Pada tahap pertama, yaitu *testing* mengedepankan pengujian berbasis ICT dan AI dengan metode *drive-thru* dan *walk-thru testing* untuk memaksimalkan kapasitas pengujian harian, memperoleh sampel dengan cepat, dan mencegah kolapsnya layanan kesehatan. Selanjutnya adalah tahap *tracking dan tracing* dengan menggunakan *geotagging* berbasis teknologi seluler. Pemerintah Korea Selatan turut mengembangkan aplikasi Corona 100m dan Self Diagnosis App (*telemedicine*), dan bekerja sama dengan perusahaan telepon seluler dan perbankan untuk membuka data warga negara yang terkonfirmasi positif Covid-19, tanpa memerlukan persetujuan dari pemilik data untuk mempermudah proses *tracking dan tracing*. Tahap terakhir adalah *treating*, sebagai upaya pemulihan dan adaptasi di tengah situasi pandemi. Masalah transparansi yang terjadi saat menangani wabah MERS ditanggulangi pemerintah lewat transparansi data pada masyarakat. Data-data tersebut termasuk penyebaran kasus positif, data perjalanan pasien positif, hingga lokasi pusat skrining Covid-19 yang disediakan dalam tiga bahasa, yaitu bahasa Korea, bahasa Inggris dan bahasa Tiongkok.

Tidak hanya berupaya mengobati dalam sektor kesehatan, pemerintah juga berupaya memulihkan kondisi ekonomi dengan berbagai kebijakan seperti, penjualan produk agrikultur secara daring dan mengeluarkan *Emergency Disaster Relief Fund*.⁵ Bantuan ini diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama difokuskan untuk menaikkan daya konsumsi masyarakat dan stimulus ekonomi, hingga mampu menaikkan GDP Korea Selatan sebesar 1,3 persen. Dan, tahap kedua untuk membantu UMKM dan menjaga stabilitas ekonomi yang mampu menaikkan GDP sebesar 1,9 persen (Han-na, 2020).

Keberhasilan penggunaan *four-pronged strategy* tersebut mampu menaikkan popularitas Presiden Moon Jae-in dan *Democratic People's Party of Korea*. Masyarakat Korea Selatan tidak lagi berfokus pada tiga isu utama, tetapi berfokus pada kemampuan pemerintah dalam menanggulangi pandemi. Bahkan, Pemilu Legislatif Korea Selatan tahun 2020 dikategorikan sebagai *critical election*, karena dilaksanakan di tengah kondisi pandemi Covid-19, yang berbagai aspek penanganannya mempengaruhi hasil pemilihan umum tersebut. NEC selaku badan penyelenggara pemilu turut melakukan rangkaian adaptasi yang untuk dapat menyelenggarakan

⁴ Amandemen dilakukan pada tiga pasal, yaitu (1) Artikel 76-2(2) yang memberikan hak pada pemerintah lokal dan Kementerian Kesehatan menghimpun data privat pasien yang terkonfirmasi positif, tanpa lebih dulu meminta persetujuan dari pemilik data; (2) Artikel 6 dan 34(2), yang berisi kendali pemerintah untuk mempublikasikan pada publik segala informasi terkait jalur pergerakan, jalur transportasi dan kontak pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19; (3) Artikel 47(2) dan 49(2), yang berisi hak pihak berwenang untuk menutup lokasi yang terkontaminasi pasien positif dan hak untuk membatasi atau melarang segala kegiatan pertunjukan, pertemuan, dan upacara keagamaan yang melibatkan individu dalam jumlah besar; dan (4) pemberlakuan denda bagi individu yang menolak melakukan tes sebesar 3,000,000 won (3,000 dolar Amerika) dan bagi individu yang melanggar aturan karantina dengan denda sebesar 10,000,000 won (10,000 dolar Amerika) atau denda kurungan penjara selama satu tahun (National Law Information Centre, 2017, chap. 8).

⁵ *Emergency Disaster Relief Fund* (긴급재난지원금) dikeluarkan oleh pemerintah Korea Selatan terhitung sejak bulan Mei 2020 untuk memulihkan dan menjaga stabilitas ekonomi akibat pandemi Covid-19, dengan upaya meningkatkan daya konsumsi masyarakat. Program ini ditargetkan untuk 2,8 juta keluarga hingga warga negara asing (khusus di wilayah Seoul) dengan total pengeluaran mencapai 14,3 triliun won (Kyung-mi, Lee & Lee Ji-hae, 2020). Jumlah bantuan dana disesuaikan dengan jumlah anggota dalam satu keluarga, dengan pembagian sebagai berikut: (1) satu orang (400,000 won); (2) dua orang (600,000 won); (3) tiga orang (800,000 won); dan (4) empat orang atau lebih (1,000,000 won) (Ji-hye, 2020, p. 4).

LITERATUS adalah jurnal yang diterbitkan oleh Neoelectura, diterbitkan dua kali dalam satu tahun. LITERATUS adalah media publikasi ilmiah dalam bentuk makalah konseptual dan penelitian lapangan yang terkait dengan bidang kajian sosial dan budaya. Diharapkan LITERATUS dapat menjadi media bagi akademisi dan peneliti untuk menerbitkan karya ilmiah mereka dan menjadi sumber referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Fokus:
Sosial dan Budaya

Ruang lingkup:
Humaniora, Pendidikan, Manajemen, Sejarah, Ekonomi, Linguistik, Sastra, Agama, Politik, Sosiologi, Antropologi, dan lainnya.

pemilu di tengah situasi pandemi. Berbagai upaya tersebut, meliputi (1) mendorong praktik *early voting*; (2) Memastikan lingkungan yang aman bagi pemilih dan petugas pemilu; (3) Berupaya mempertahankan komunikasi publik yang baik; (4) Mengedepankan transparansi dalam pemilu; hingga (5) beradaptasi dengan bentuk kampanye alternatif. Selain itu, Pemilu Legislatif Korea Selatan tahun 2020 menjadi pemilu pertama yang menerapkan reformasi elektoral. Reformasi ini merubah sistem elektoral menjadi *mixed member majoritarian representation/parallel voting* dan penurunan batas minimum usia pemilih menjadi 18 tahun. Hal tersebut berdampak pada kemunculan partai satelit dan penambahan 540,000 pemilih (1,2 persen) (Yonhap, 2020).

PENUTUP

Kemenangan *Democratic People's Party of Korea* dalam tulisan ini dijelaskan dengan menggunakan teori *civic duty* yang dikemukakan oleh Blais dan Achen, beserta teori *retrospective voting* oleh Fiorina. Blais dan Achen (2018) menjelaskan bahwa *civic duty* diartikulasikan sebagai bentuk hak suara warga negara dalam pemilu, yang menilai *voting* sebagai suatu hal yang tepat untuk dilakukan (*ethically right*). Hal tersebut digunakan untuk menjelaskan tingginya partisipasi masyarakat Korea Selatan pada pemilu yang dipengaruhi oleh tingginya *civic duty* dalam masyarakat. Sementara, *retrospective voting* secara garis besar memposisikan pemilih sebagai pihak dengan pola pikir *result oriented*, sehingga cakupan penilaian akan mengarah pada bentuk *reward* (imbalan) atau *punishment* (hukuman), yang diartikulasikan dalam bentuk pilihan dalam pemilu. Meski kerap menjadikan kebijakan ekonomi sebagai faktor utama penilaian *retrospective*, namun pada kasus Korea Selatan faktor lainnya seperti kebijakan luar negeri turut mempengaruhi penilaian tersebut. Apabila terdapat faktor lain yang memiliki urgensi lebih tinggi seperti pandemi Covid-19, maka kecakapan dalam menanggulangi krisis dapat menjadi indikator utama penilaian.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu kali ini, dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama*, terkait munculnya kembali *nation-saving duty* dalam masyarakat. Sebelumnya, pola pikir ini muncul pada Pemilu Presiden Korea Selatan tahun 2017, pasca pemakzulan Presiden Park Geun-hye. Pemakzulan Presiden Park Geun-hye dan pandemi Covid-19 dinilai sebagai 'krisis nasional' yang menciptakan rasa persatuan bagi semua pemilih, dan mengubah pemungutan suara hampir menjadi bentuk *nation-saving duty* yang harus dilakukan secara kolektif. Bentuk *nation-saving duty* di Korea Selatan kerap diartikulasikan dalam mobilisasi massa dan mengarah pada pilihan pemilih dalam pemilu. Hal tersebut juga didukung dengan tingginya *civic duty* masyarakat Korea Selatan yang dipengaruhi oleh paham Konfusianisme. Paham Konfusianisme mempengaruhi terbentuknya *neo-confucianism politics* di Korea Selatan, yang mempengaruhi peran besar masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan kolektif dan hubungan konfrontatif yang tercipta antara masyarakat dengan pemerintah.

Kemenangan *Democratic People's Party of Korea* turut dipengaruhi oleh pola penilaian *retrospective* yang dilakukan oleh masyarakat. Jika tidak dilanda pandemi Covid-19, *Democratic People's Party of Korea* dapat mengalami kekalahan telak akibat penilaian *retrospective* yang dilakukan. Sebab, stagnasi kebijakan ekonomi dan minimnya perkembangan reunifikasi dengan Korea Utara menjadi salah dua faktor penting yang menjadi basis penilaian *retrospective*. Namun, kedua hal tersebut tidak menjadi faktor determinan, karena tergantikan oleh penanganan Covid-19 sebagai hal yang lebih krusial dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan penanganan Covid-19 dengan *four-pronged strategy*, menjadi basis utama *retrospective evaluation* yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan Presiden Moon Jae-in. Dan, hasil penilaian tersebut diartikulasikan dalam bentuk dukungan yang diberikan kepada partai yang berafiliasi dengan Presiden Moon Jae-in, yaitu *Democratic People's Party of Korea*.

Penelitian ini menjawab faktor-faktor kemenangan *Democratic People's Party of Korea* pada Pemilu Legislatif Korea Selatan tahun 2020 dipengaruhi oleh berbagai aspek salah satunya kecakapan pemerintah Presiden Moon Jae-in dalam menanggulangi Covid-19 di Korea Hal tersebut memicu tingginya partisipasi masyarakat dan menciptakan basis penilaian *retrospective* bagi masyarakat di Korea Selatan, sehingga penggunaan *four-pronged strategy* dan tingginya *civic duty* dalam masyarakat Korea Selatan menjadi faktor penentu kemenangan *Democratic People's Party of Korea* dalam Pemilu Legislatif Korea Selatan tahun 2020.

Meski memperoleh kemenangan pada pemilu kali ini, pandemi yang masih berlangsung turut mempengaruhi penilaian masyarakat pada kinerja pemerintahan Presiden Moon Jae-in

sekaligus popularitas dari *Democratic People's Party of Korea*. Dalam beberapa waktu terakhir, Presiden Moon Jae-in kembali mengalami penurunan angka *approval rating* hingga 33 persen akibat kenaikan harga rumah di kota-kota besar di Korea Selatan dan lambannya pemerintah Korea Selatan dalam program vaksinasi Covid-19 (Yonhap News Agency, 2021). Penurunan ini turut mempengaruhi hasil pemilihan walikota di kota-kota besar seperti Seoul dan Busan, yang dimenangkan oleh partai oposisi. Berdasarkan hal tersebut, penanggulangan pandemi dan performa ekonomi masih menjadi faktor determinan yang mempengaruhi popularitas calon kandidat dalam pemilu. Jika pandemi masih berlangsung hingga pelaksanaan Pemilu Presiden Korea Selatan tahun 2022, maka penelitian ini selanjutnya dapat membandingkan seberapa besar pengaruh kebijakan terkait pandemi dan kebijakan ekonomi untuk menarik atensi masyarakat Korea Selatan dalam memilih calon kandidat pada pemilu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achen, C.H., & A. H. (2011). Civic Duty and Voter Turnout in Japan and South Korea. *선거연구*, 1(2), 45-69.
- Achen, C.H., L.M.B. (2017). Democracy for Realist: Why Elections Do Not Produce Do Not Produce Responsive Government. *The Journal of Public and International Affairs*, 132(3), 549-550. <https://doi.org/10.1002/polq.12663>.
- Almond, G., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. New Jersey: Princeton University Press.
- Blais, A., Christopher, A. (2018). Civic Duty and Voter Turnout. *Political Behaviour*, 41(1), 473-497.
- Chang W., Kalmanson. L. (2010). *Confucianism in Context: Classic Philosophy and Contemporary Issues, East Asia and Beyond*. Albania: State University of New York Press.
- Choon, Chang-May. Petition to impeach Moon over South Korea handling of coronavirus as cases hit 1,261. <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/petition-to-impeach-moon-over-south-korea-handling-of-coronavirus-as-cases-hit-1261>. (Akses 6 Januari 2021).
- Dalton, R. (2008). Citizenship Norms and the Expansion of Political Participation, *Political Studies*, 56(1), 76-98.
- Delury, J. (2017). The candlelight revolution. *Dissent*, 64(1), 98-101. <https://doi.org/10.1353/dss.2017.0035>.
- Do-hyun, H. (2010). Contemporary Korean Society Viewed Through the Lens of the Candlelight Vigils of 2008. *Korean Journal*, 50(3), 5-13.
- Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper and Row.
- Election Guide. South Korean Presidential Election Turnout Voters. <https://www.electionguide.org/countries/id/114/>, (akses 24 Oktober 2020).
- Fiorina, Morris P. (1981). *Retrospective Voting in American National Elections*, New Haven, CT: Yale University Press.
- IDEA Team. (2016). Risk Management in Elections. *Policy Paper No.14*, 1-68.
- IDEA Team. (2020). Managing Elections During the Covid-19 Pandemic: Considerations for Decision-maker. *IDEA Policy Brief*, 1-8.
- Ji-hye, Jun. South Korea begins offering coronavirus relief funds. <http://m.koreatimes.co.kr/pages/article.asp?newsIdx=288952>. (Akses 15 Desember 2020).
- Joseph, Y., Lee W.D. (2020). Pandemic Nationalism in South Korea. *Journal Springer Global Society*, 57, 446-451.
- Key, V. O. (1966). *The Responsible Electorate*. New York: Vintage Books.
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford: Clarendon Press.
- Landman, T., Luca, D. G. (2020). Pandemic Democracy: Elections and Covid-19. *Journal of Risk Research*, 1-7.
- Maizland, L. "How Countries Are Holding Elections During the Pandemic Covid-19".

<https://www.cfr.org/backgroundunder/how-countries-are-holding-elections-during-covid-19-pandemic>, (akses pada Sabtu, 24 Oktober 2020).

- Persily, N., & Charles, S. III. (2021). The Miracle and Strategy and Tragedy of the 2020 US Election. *Journal of Democracy, MIT University Press*, 32(2), 159-178.
- Se-hwan, Bak. "LIVE UPDATES: South Korea Elects New President" <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170508000895>, (akses 24 Oktober 2020).
- Spinelli, A. (2020). Managing Elections Under the Covid-19 Pandemic: The Republic of Korea's Crucial Test. *International Technical Idea Technical Paper*, 1-8.
- So-hee, Kim., Lee Hee-su. The Virus Hunter Showing the World How to Fight an Epidemic. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-20/the-virus-hunter-showing-the-world-how-to-fight-an-epidemi>. (Akses 3 Januari 2021).
- Stewart III, C. (2020). How We Voted in 2000: A First Look of the Survey of the Performance of American Election. *MIT Election Data and Science Lab*. 1-34.
- Sullivan, K. (2020). Impact of Covid-19 on the 2020 US Presidential Election. *International IDEA Journal*, 1-30.
- The Government of the Republic of Korea. (2020). *Flattening the Curve on Covid-19: How Korea Response to A Pandemic Using ICT*. Korea Selatan: Korea Disease Control and Prevention Agency.
- Tong-Hyung, Kim. "South Korean Ruling Party Wins Supermajority in Legislative Election". <https://thediplomat.com/2020/04/south-korean-ruling-party-wins-supermajority-in-legislative-election/>, (akses Sabtu, 24 Oktober 2020).
- Yonhap. National Assembly Passes Electoral Reform Bill Amid Opposition Lawmakers' Protest. <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20191227000617>. (Akses Kamis, 18 Maret 2021).
- Yonhap News Agency. Moon's Approval Rating at All-time Low of 33 Percent: Realmeter. <https://en.yna.co.kr/view/AEN20210503000800315>. (Akses 6 Mei 2021).

LITERATUS adalah jurnal yang diterbitkan oleh Neolectura, diterbitkan dua kali dalam satu tahun. LITERATUS adalah media publikasi ilmiah dalam bentuk makalah konseptual dan penelitian lapangan yang terkait dengan bidang kajian sosial dan budaya. Diharapkan LITERATUS dapat menjadi media bagi akademisi dan peneliti untuk menerbitkan karya ilmiah mereka dan menjadi sumber referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Fokus:
Sosial dan Budaya

Ruang lingkup:
Humaniora, Pendidikan, Manajemen, Sejarah, Ekonomi, Linguistik, Sastra, Agama, Politik, Sosiologi, Antropologi, dan lainnya.